

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jln. J. F. Puttileihat – P I R U

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan tahunan ini. Laporan tahunan ini dimaksud untuk memberikan gambaran kegiatan yang telah kami kerjakan pada tahun 2020 dan sekaligus memberikan gambaran bagaimana Kinerja Dinas Ketahanan Kabupaten Seram Bagian Barat selama satu tahun anggaran.

Dengan kondisi keuangan yang ada, kami mencoba sekuat tenaga untuk mencurahkan segala tenaga dan pikiran kami untuk mengemban amanah yang telah dipercayakan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua kepala bidang, kepala seksi dan semua pihak yang telah membantu untuk bahan penyusunan laporan tahunan ini sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Kami juga menyadari bahwa apa yang telah kami lakukan ini masih jauh dari harapan semua pihak, Untuk itu kami akan terus mencoba melakukan refleksi, koreksi dan evaluasi, sehingga perjalanan kedepan akan semakin baik, sempurna dan memenuhi keinginan semua pihak.

Laporan Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dibuat berdasarkan tujuan pokok dan fungsi setiap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 baik yang berasal dari dana APBD. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan memberikan masukan terhadap program pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Seram Bagian Barat



SAMIMY LOUPATTY, SE
NIP. 19640912 199402 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana diamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented).

LAKIP diimplementasikan secara "self assesment" oleh masing-masing instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mindset para birokrat dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauasakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented accountabillity) dan proses kearah akuntabilitas pada hasil (result oriented accountabillity), terutama outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Dinas Ketahanan Pangan sebagai Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan sumber dana dan sumberdaya manusia yang ada telah berusaha secara maksimal meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat yang selanjutnya didukung oleh 7 (Tujuh) program serta 27 (dua puluh tujuh) kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2020, dan semuanya telah terlaksana.

Secara umum capaian sasaran strategis tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik, dengan rata-rata persentase keuangan belanja tidak langsung sebesar 100% serta belanja langsung persentase capaian fisiknya sebesar 100 % dan persentase keuangan sebesar 99,00 %. Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020, didukung dengan dana sejumlah Rp 2.625.881.715,91,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 1.733.201.915.91,- dan Belanja Langsung Rp 892.679.800. dengan hasil dalam pencapaian indikator utama yakni (ketersediaan pangan utama sebesar 404.17 dengan capaian kinerja sebesar 107.72%, PPH sebesar 65.6 capaian kinerja 87.47, persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida sebesar 57.20 capaian 76.22% dan cakupan daerah rawan pangan sebesar 59.11% dengan capaian kerjanya adalah 78.70%).

Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai PADA Tahun Anggaran 2020 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI ditahun berikutnya. Selanjutnya agar dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dimasa yang akan datang, maka LKIP ini perlu dipahami dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh semua staf dilingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Seram Bagian Barat



KEPALA DINAS

SAMMY LOUPATTY, SE
NIP. 19640912 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi.....	5
1. Tugas.....	5
2. Fungsi.....	5
3. Susunan Organisasi.....	6
C. Maksud dan Tujuan.....	16
D. Aspek Strategis yang Berpengaruh.....	16
E. Sistematika Penyajian.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	19
1. Pernyataan Visi.....	19
2. Pernyataan Misi.....	20
3. Tujuan dan Sasaran.....	21
B. Perjanjian Kinerja.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	25
1. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	25
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran.....	30
3. Perbandingan Realisasi Sasaran 2020 dengan Target Rentsra SKPD.....	31
4. Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2020 dengan Target Nasional 2020.....	32

5. Realisasi Anggaran/ Kegiatan Penunjang.....	33
B. Realisasi Anggaran.....	35
BAB IV PENUTUP	
A. Masalah Umum yang Dihadapi.....	39
B. Saran serta Cara Peningkatan Kinerja pada Periode Mendatang.....	40
C. Kesimpulan.....	41

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2020.....	22
Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020.....	23
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	24
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020.....	25
Tabel 3.3 Realisasi anggaran dan Capaian Kinerja	29
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	30
Tabel 3.5 Evaluasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra SKPD.....	31
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.....	32
Tabel 3.7 Realisasi Program Pendukung Capaian Target sasaran.....	34
Tabel 3.8 Realisasi program pendukung Capaian Target sasaran.....	35
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja.....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	6

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan adalah merupakan bagian dari pembangunan pertanian dalam arti luas yang berbasis kepada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang di mulai dari hulu ke hilir pada peningkatan usahatani (on-farm) dan sampai dengan usaha produksi/pengolahan hasil (off-farm). Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terganggunya kegiatan perekonomian di semua lini usaha, termasuk sektor pertanian. Salah satu dampak yang harus diantisipasi terkait dampak Covid-19 adalah ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Gerakan Ketahanan Pangan (GKP) yang diperkenalkan Kementerian Pertanian di tengah ancaman virus corona saat ini harus didukung oleh semua pihak, khususnya petani dan penyuluh sebagai ujung tombak dan penggerak sektor pertanian, sebagaimana dikutip dari liputan6.com (12/6/2020), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa Covid-19 telah meluluh lantakkan semua sektor kehidupan. Kegiatan perekonomian masyarakat banyak terhenti, pelayanan jasa terhambat, dan sektor pertanian mengalami pukulan yang cukup berat.

Gangguan yang lebih serius dideteksi pada sistem distribusi dan pemasaran. Oleh karena itu, Mentan mendorong petani dan penyuluh melakukan percepatan tanam untuk mendukung GKP secara nasional. Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah merumuskan Metode 4 (Empat) Cara Bertindak untuk mencapai ketahanan pangan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Kementan mengajak pelaku pertanian melaksanakan percepatan tanam padi Musim Tanam II 2020 seluas 6,1 juta ha, termasuk intensifikasi lahan rawa 85.456 ha dan ekstensifikasi lahan pertanian 79.142 ha. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Kementan akan mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang berfokus pada satu komoditas utama. Ketiga, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah provinsi (CBPP), kemudian penguatan cadangan beras pemerintah kabupaten/kota (CBPK). Keempat, pengembangan pertanian modern, caranya melalui pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan screen house untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura

di luar musim tanam, pengembangan korporasi petani, dan pengembangan food estate untuk peningkatan produksi pangan utama (beras/jagung).

Untuk itu dalam mewujudkan Ketahanan Pangan pada masa pandemi ini harus didasari dengan 3 (tiga) pilar utama yang telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu : 1). Ketersediaan, 2). Keterjangkauan dan 3). Pemanfaatan Pangan, dimana peningkatan Ketahanan Pangan akan bermuara pada keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact) yaitu : Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Visi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun adalah "Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan".

Pemerintah daerah mempunyai peran yang signifikan dalam menjaga ketahanan pangan dimasa pandemi melalui berbagai strategi seperti mendorong pemanfaatan lahan, mencegah alih fungsi lahan produktif dan menggalakan pemanfaatan pekarangan lahan serta juga harus memetakan daerah rawan pangan dan mengantisipasi dampak COVID-19 yang terjadi, dimana merupakan tugas penting oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk mengatasi permasalahan dan mewujudkan ketahanan pangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan sebagai salah satu unit kerja Eselon II yang memiliki tugas yaitu: "melakukan kegiatan, koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan dibidang ketahanan pangan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijakan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Disamping itu, sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

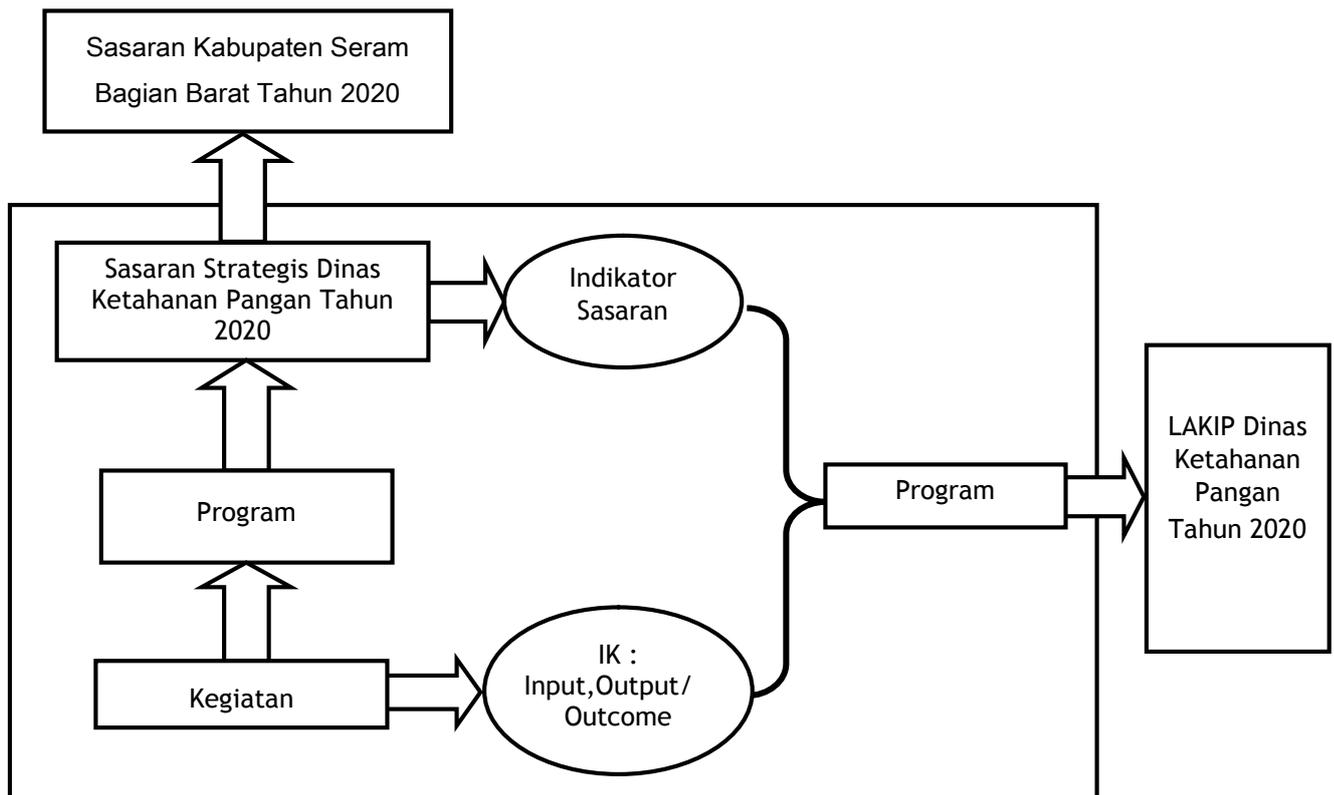
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Kinerja, bahwa Laporan kinerja merupakan kewajiban dari setiap instansi pemerintahan pada akhir tahun berlaku sebagai laporan pertanggungjawaban secara sistematis dan melembaga. Laporan tersebut untuk mengukur seberapa jauh tingkat kinerja dan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintahan.

Selanjutnya guna mengetahui kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan tersebut selama tahun 2020, disusunlah Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam perwujudan mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan ini secara umum sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati Seram Bagian Barat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKIP juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/atau sasaran atau kegiatan utama dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa datang, kuncinya adalah penekanan pada tujuan atau sasaran atau program kegiatan yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing Unit pelaksana (Bidang) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020. Indikator sasaran menggunakan indikator kerja utama yang dipilih dari

beberapa output dan atau outcome dari kegiatan, dimana meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Seram Bagian Barat, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Dokmen Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan tahun anggaran 2020. Gambaran pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian disajikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. 1. Alur Pikir Pengukuran Kinerja



Metode penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan, secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemeintah. Dalam pengukuran kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020, menggambarkan indikator kinerja outcome pada program/kegiatan yang dilakukan sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020.

B. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

1. Tugas Pokok

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) adalah Unsur Pelaksana Otonomi Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 04 tahun 2016, dimana dalam menyelenggarakan roda organisasi, Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang diberi hak otonom dalam membantu Bupati terhadap tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, maka dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai tugas urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan pemerintah daerah di bidang ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas mempunyai fungsi:

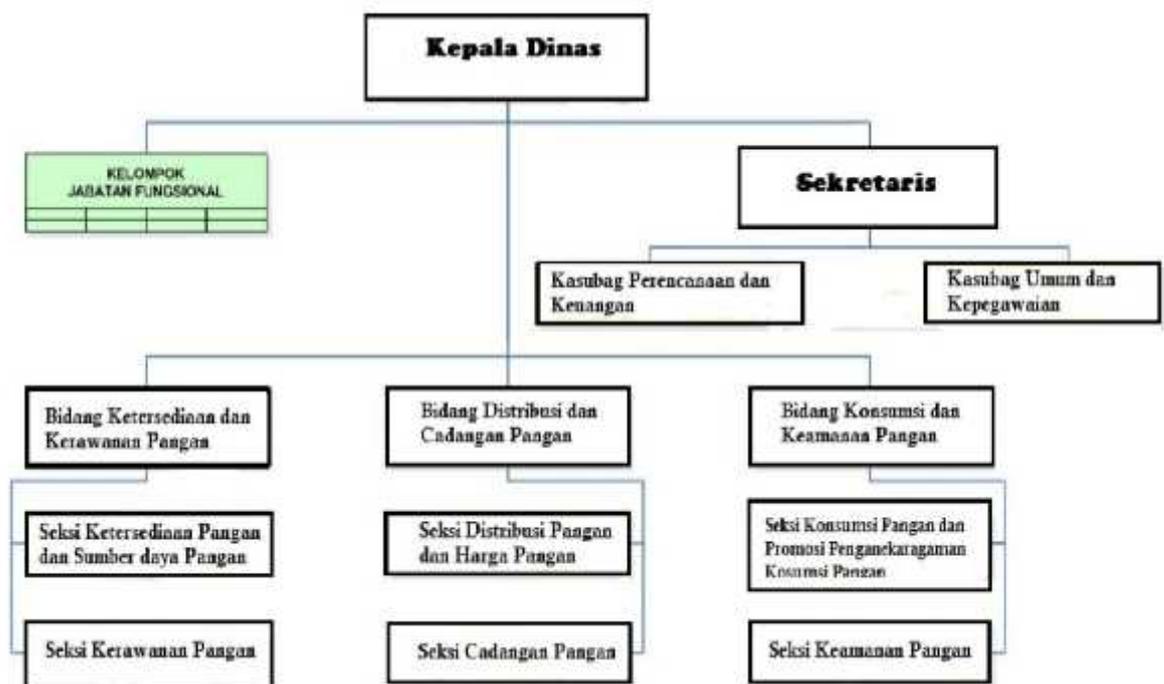
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana operasional dibidang ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan perumusan program pemantauan dan evaluasi produksi pangan daerah;
- c. Pelaksanaan perumusan program pemantauan, pengkajian dan evaluasi ketersediaan cadangan pangan, kerawanan pangan dan gizi pangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan pola distribusi dan analisis keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan mitra pengelola/ pelaku ketahanan pangan;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;

- i. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga otonom, selain Kepala Dinas sebagai penanggung jawab organisasi, juga oleh staf yang berperan melaksanakan koordinasi dan tugas-tugas operasional teknis baik sebagai sekretaris maupun kepala bidang dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 25 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas, maka struktur Organisasi Dinas Keahanan Pangan terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang-bidang dan Jabatan Fungsional, dengan susunan organisasi dapat dilihat pada gambar 2.1, berikut ini.

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan



3.1. Kepala Dinas

Sesuai pasal 3 ayat (1-2) Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016, maka Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sesuai pasal 3 peraturan bupati nomor 38 tahun 2016, Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- 3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- 4) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
- 5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, pangan dan keamanan pangan;
- 6) Pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3.2. Sekretaris

Sekretariat Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas ketahanan pangan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis dan program kerja pada sekretariat;
- 2) Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja serta anggaran bidang secara terpadu;
- 3) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kesekretariatan;
- 4) Pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- 5) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana, hukum, keprotokolan dan kehumasan;

- 7) Pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas ketahanan pangan;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan dinas; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyusunan rencana program kegiatan dan urusan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan serta urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian perencanaan dan keuangan;
- d. Melakukan penyusunan anggaran serta urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan serta evaluasi realisasi anggaran;
- f. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama serta penyusunan laporan keuangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

3.2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan kepegawaian;
- c. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian umum dan kepegawaian;
- d. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- e. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- f. Melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- g. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

3.3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi dibidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Bagian Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- 2) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 3) Menyiapkan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan ;
- 4) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- 5) Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 6) Pemberian pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penerangan kerawanan pangan;
- 7) Menyiapkan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pananganan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3.1. Seksi Ketersediaan Pangan dan Sumberdaya Pangan

Wilayah tugas meliputi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN);
- d. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
- e. Menyiapkan bahan analisis dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pangan lainnya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan serta penyediaan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
- h. Menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. Menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

- j. Menyiapkan bahan pendampingan, penyediaan infrastruktur dan sumberdaya ketahanan pangan dibidang ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;
- k. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3.3.2. Seksi Kerawanan Pangan

Seksi kerawanan pangan, melaksanakan tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi kerawanan pangan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- c. Menyiapkan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di subbagian kerawanan pangan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- f. Menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. Menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten;
- i. Menyiapkan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- j. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3.4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi dan cadangan pangan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bidang distribusi dan cadangan pangan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang distribusi dan cadangan pangan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi, harga pangan dan cadangan pangan;
- 3) Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- 4) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- 5) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan serta pemantapan program di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan ;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.4.1. Seksi Distribusi dan Harga Pangan

Seksi Distribusi dan Harga Pangan melaksanakan tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi distribusi dan harga pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan kordinasi di bidang ditribusi dan harga pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik di seksi distribusi dan harga pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;

- f. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta harga pangan;
- g. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan serta pengumpulan data, harga pangan di lingkup produsen dan konsumen untuk panel harga ;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan dan harga pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3.4.2. Seksi Cadangan Pangan

Seksi cadangan pangan, melaksanakan tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang cadangan pangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik seksi cadangan pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- f. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- g. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3.5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat

(1) bidang konsumsi dan keamanan pangan mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis perencanaan dan program kerja pada bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- 2) Penyiapan pelaksana kordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- 3) Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- 4) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- 5) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- 6) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- 7) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan ketahanan pangan;
- 9) Pelaksaaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.5.1. Seksi Konsumsi Pangan dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Seksi konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi konsumsi pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan kordinasi di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- d. Menyusun stándar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik seksi konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
- f. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas perkapita pertahun serta penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- g. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang (b2sa) beragam, bergizi seimbang dan aman (b2sa) berbasis sumber daya lokal non beras dan non terigu;
- h. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan penkarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3.5.2. Seksi Keamanan Pangan

Seksi Keamanan Pangan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada seksi keamanan pangan;
- b. Menyiapkan bahan kordinasi di bidang keamanan pangan serta melakukan analisis di bidang keamanan pangan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan pangan;
- d. Menyusun standar operasional prosedur dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik seksi keamanan pangan;
- e. Menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. Menyiapkan bahan pendampingan dan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar di bidang keamanan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan jejaringan keamanan pangan daerah (jkpd) serta melakukan komunikasi informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan laporan hasil kegiatan di bidang keamanan pangan;
- i. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah :

1. Merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program Pemerintah dibidang ketahanan pangan;
2. Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun anggaran 2020;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap semua kegiatan program/kegiatan selama ketahanan pangan Tahun anggaran 2020;
4. Sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan serta perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

D. Permasalahan utama yang dihadapi Organisasi

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro, dimana isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar. Isu-isu dan masalah ketahanan pangan adalah :

1. Keterbatasan SDM dan infrastruktur ketahanan pangan;
2. Tingginya ketergantungan masyarakat pada bahan pangan beras;
3. Adanya kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi rawan pangan yang belum teridentifikasi dan masih terdapatnya masyarakat rawan pangan;
4. Orientasi pengembangan bisnis pangan masih berskala rumah tangga dan bersifat tradisonal, pola pengembangan belum menuju pada pengembangan agroindustri pangan skala UMKM;
5. Pola kemitraan dalam pengelolaan dan pemasaran hasil olahan belum terbentuk sepenuhnya;
6. Kurangnya informasi pasar bagi petani yang mengusahakan komoditas pangan, sehingga hasil produksi pangannya memiliki daya tawar yang rendah;
7. Masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif;
8. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang mutu dan keamanan pangan, dimana hasil penelitian Dinas Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan Propinsi Maluku, bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat masih banyak mengandung Residu Pestisida;
9. Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2020 yang menyebabkan, keterbatasan masyarakat dalam beraktivitas.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 adalah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaiberikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi
- E. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2017-2022
 - 1. Pernyataan Misi
 - 2. Pernyataan Visi
 - 3. Tujuan dan Sasaran Strategis
- B. Rencana Kinerja Tahunan 2020
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pencapaian / Pengukuran Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Masalah Umum yang dihadapi
- B. Sasaran serta Cara Peningkatan Kinerja Pada Periode Mendatang
- C. Kesimpulan

Lampiran :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Bupati sebagai Kepala Daerah.

Proses pembangunan pertanian tidak terlepas dari program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Tahun 2020 merupakan tahun keempat pembangunan pada rencana jangka menengah Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu tahun 2017-2022 yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

RPJMD Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu menengah maka disusun Renstra Tahun 2017-2022 sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan maupun perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundangan yang baru maka Visi dan Misi hanya dibuat pada level Kepala Daerah (Kabupaten/Kota), sehingga Dinas Ketahanan Pangan juga menggunakan Visi-Misi Kepala Daerah terpilih, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan dan merupakan cita-cita yang didukung oleh keadaan sekarang dan merupakan arah bagi pengelolaan lembaga. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat keberadaannya sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi diharapkan dapat memberikan peran nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengacu pada visi Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, yakni “Mewujudkan Masyarakat Seram Bagian Barat yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”, yang mana visi ini memiliki makna yang sangat strategis dan perlu dipahami lebih mendalam oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat serta semua pihak yang berkepentingan.

2. Pernyataan Misi.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus, dan menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mencapai visi. Misi merupakan suatu pernyataan, tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang atau sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh organisasi. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dirumuskan misi Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, inovatif dan berwibawa;
2. Meningkatkan toleransi umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan Pemerintah);
3. Mengembangkan bidang pendidikan yang berkualitas;
4. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas;
5. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
6. Memperkuat pembangunan infrastruktur;
7. Mengembangkan pembangunan kepariwisataan;
8. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dalam pernyataan 8 (Delapan) butir misi diatas, sebagai acuan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat untuk pembangunan 5 (Lima) tahun kedepan, maka sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian misi kabupaten yakni tertuang dalam butir ke 5 (Lima) “Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” sebagai

bagian dari penguatan kedaulatan dan kemandirian pangan demi meningkatkan ekonomi masyarakat.

Hasil kajian terhadap berbagai issue strategis serta dinamika perkembangan pembangunan pada urusan pangan demi mewujudkan kedaulatan pangan yang tertuang dalam butir kelima dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, maka sesuai dengan tupoksinya masuk dalam upaya untuk mendukung misi kedua tersebut, maka dirumuskan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai berikut :

1. Mengembangkan sistem ketahanan pangan berbasis pada karakteristik wilayah dan keragaman sumber pangan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi.
2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk pemantapan ketahanan pangan tingkat rumah tangga melalui pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang berkesinambungan.

3. Tujuan dan Sasaran

Bertolak dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2017-2018 serta isu-isu strategis peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan tujuan dengan sasaran utama serta indikator-indikator terukur yang harus dicapai, yang diantaranya sebagai berikut :

➤ Tujuan

- Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan serta pelayan yang prima;
- Menuju kemandirian rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berdikari.

➤ Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah :

- Meningkatnya pembenahan kapasitas pemerintahan yang prima;

- Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.

Pernyataan tujuan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, beserta indikator utama dapat disajikan dalam tabel 2.1, berikut ini :

Tabel. 2. 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2			4
Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan serta pelayanan yang prima;	Meningkatnya Pembenahan Kapasitas Pemerintahan yang prima	Meningkatnya pelayanan Adm perkantoran	Penyediaan Bahan Logistik Perkantoran
		Meningkatnya Kinerja Aparatur	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penyediaan Peralatan Komputer /Laptop
		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun
Menuju Kemandirian Pangan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berdikari	Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.	Peningkatan ketersediaan Pangan Utama, Jaringan Distribusi Pangan dan harga pangan serta Cadangan Pangan Pangan Masyarakat	Memberikan bantuan bibit pekarangan untuk peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan pendapatan Rumah Tangga
			Penyediaan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
		Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat.	Mendorong Konsumsi Pangan Lokal lainnya agar mengurangi ketergantungan akan pangan impor
			Mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
		Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk pangan	Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
	Penangan Daerah Rawan Pangan	Pendistribusian Beras Cadangan Pangan Pemerintah	

B. Perjanjian Kinerja.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Ketahanan Pangan hingga Eselon IV lingkup Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020. Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat disusun berdasarkan DPA Dinas Ketahanan Pangan tahun anggaran 2020 dan dilakukan perubahan sesuai dengan DPA

Perubahan. Perjanjian kinerja memuat program yang dilaksanakan, sasaran strategis yang akan dicapai, indikator target kerjanya, serta anggaran yang tersedia sesuai dengan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2020, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020, tercantum dalam Belanja Langsung (Belanja Program/Kegiatan) yang telah mengalami refocusing dengan jumlah sebesar Rp 892.679.800,00,-. Berikut ini sajian sasaran dan indikator kinerja serta target pada tahun anggaran tahun 2020

Tabel. 2. 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya konsumsi pangan utama sesuai kebutuhan dan Meningkatkan sistem distribusi pangan serta pemantauan harga pangan secara berkala	Ketersediaan Pangan Utama	375,17
2	Terwujudnya Pola Pangan Harapan di Kabupaten Seram Bagian Barat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan	75
3	Meningkatnya ketersediaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar di pasaran dan petani	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida	75%
4	Penanganan daerah rentan rawan pangan	Cakupan Daerah Rawan Pangan	75%

Indikator Sasaran Kinerja dan target kerjanya sampai pada tahun ke empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun anggaran 2017-2022 belum memenuhi target renstra. Selanjutnya secara lengkap perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020, disajikan pada lampiran II.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana diketahui Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Analisis Pencapaian Kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa mendatang. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
	85 s/d 100	Sangat Berhasil
	70 s/d < 85	Berhasil
	55 s/d < 70	Cukup Berhasil
	0 s/d < 55	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

1. Capaian Kinerja Tahun 2020.

<p>Sasaran Strategis</p> <p>Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.</p>

Sasaran strategi ini ditujukan sebagai upaya memenuhi tujuan pembangunan nasional dibidang ketahanan pangan, sebagaimana yang termaktub dalam Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat yakni “Menuju kemandirian Pangan Masyarakat seram bagian barat yang berdikari”. Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2020, difokuskan pada Sasaran Staregis dimana dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang dikelompokan dalam 16 (Enam Belas) kegiatan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasinya.

Keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan program dan kegiatan diukur berdasarkan pencapaian outcome. Pengukuran tersebut dilakukan mengingat outcome merupakan hasil dari berfungsinya output yang telah dilaksanakan masing-masing Bidang. Hasil pengukuran capaian sasaran tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, dirinci sebagai berikut, diantaranya adalah :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Terpenuhinya konsumsi pangan utama sesuai kebutuhan dan Meningkatkan system distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Ketersediaan Pangan Utama	375,17	404,17	107,72
2	Terwujudnya Pola Pangan Harapan di Kabupaten Seram Bagian Barat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan	75	65,6	87,47
3	Meningkatnya ketersediaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar di pasaran dan petani	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida	75%	57,20%	76,22%
4	Penanganan daerah rentan rawan pangan	cakupan penanganan daerah rentan rawan pangan	75%	59,11%	78,80%

A. Ketersediaan Pangan Utama

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(2)	(3)	(4)		
Terpenuhinya konsumsi pangan utama sesuai kebutuhan dan Meningkatkan system distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Ketersediaan Pangan Utama	375,17	404,17	107,72

Tercapainya ketersediaan pangan utama telah melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja tahun ini sebesar 107,95 %, dengan realisasi ketersediaan pangan utama sebesar 321,17 Ton/kapita beras dan Gula sebesar 183,0 ton dari target 375,71 Ton/kapita, artinya dari spek ketersediaan pangan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp 384.039.500,- atau 98,63% dengan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,36 % dari pagu yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama tidak terlepas dari pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dimana melalui kegiatan ini Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait guna mewujudkan pencapaian target utama yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian.

B. Jumlah Skor Pola Pangan Harapan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Pola Pangan Harapan di Kabupaten Seram Bagian Barat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan	75	65,6	87,47

Capaian kinerja pada sasaran 2 yakni Terwujudnya Pola Pangan Harapan di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Indikator Kinerja yakni jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 75 dimana realisasi

hanya sebesar 65.6 yang mana belum memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 87,47%.

Pola Pangan Harapan merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menilai kualitas konsumsi pangan yang merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi penduduk diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat dan daya beli.

Tidak tercapainya target PPH-Konsumsi di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 diakibatkan adanya refocusing anggaran yang sangat signifikan sehingga mempengaruhi intervensi dalam pelaksanaan kegiatan skor pola pangan harapan. Beberapa kegiatan yang outputnya adalah meningkatkan keragaman konsumsi pangan seperti Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional, Kegiatan Pendampingan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (PKPK/SOLID), Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL), Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (PPH-Konsumsi), Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan 9NBM/PPH), Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG) serta Kegiatan Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia mengalami refocusing anggaran dari 0 % (ditiadakan) hingga 50%. (lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel realisasi anggaran dibawah ini).

C. Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang bebas Residu Pestisida

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketersediaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar di pasaran dan petani	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida	75%	57,20%	76,22%

Pada sasaran : Meningkatnya ketersediaan pangan segar asal tumbuhan yang beredar di pasaran dan petani, dapat diukur melalui persentase pangan segar asal tumbuhan yang bebas residu pestisida. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui program Ketahanan Pangan pada kegiatan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan dengan dana sebesar Rp. 48.625.000,-.

Realisasi target kinerja pada sasaran ini berada dibawah target yang telah ditetapkan sehingga pencapaiannya hanya sebesar 57,20%. Hal ini disebabkan akibat dari adanya refocusing anggaran sehingga dalam realisasinya tidak semua sentra produksi di 11 (Sebelas Kecamatan) dapat ditinjau. Dinas Ketahanan Pangan melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan telah melakukan upaya dalam rangka mewujudkan pangan segar yang bermutu dan aman untuk dikonsumsi yang bebas dari cemaran kimia, biologis dan fisik dengan tujuan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pemantauan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan di semua rantai distribusi pangan baik di tingkat petani, pengumpul dan pedagang.

D. Cakupan Penanganan Daerah Rawan Pangan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran ini, dilakukan pengukuran kinerja dengan hasil sebagai berikut: :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penanganan daerah rentan rawan pangan	cakupan penanganan daerah rentan rawan pangan	75%	59,11%	78,80%

Capaian kinerja pada sasaran keempat yakni Penanganan daerah rentan rawan pangan dengan indicator cakupan penanganan daerah rawan pangan tidak mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 78.80 %, hal ini Karena beberapa kegiatan yang di usung untuk memperlancar pencapaian target mengalami refocusing anggaran yang mana kegiatan tersebut sudah dilaksanakan lain akibat dari adanya pandemic Corona Virus Disease 2019. Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui kegiatan penyusunan peta FSVA dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 40.744.700 dari perencanaan dalam RKPD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 150.000.000,-

Untuk lebih jelasnya dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam memenuhi target yang ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani dengan Bupati, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja per Kegiatan Tahun 2020

NO	Program/Kegiatan	Target (%)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan	6 (Enam) Menu Baru	7,200,000	100.00
2	Kegiatan Pendampingan, Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/SOLID	22 (Dua puluh dua) Desa	56,447,500	99,91
3	Analisis dan Penyusun Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (PPH-Konsumsi)	1 (satu) Dokumen	37,107,500	100.00
4	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL)	8 (Delapan) Desa	40,264,500	100.00
5	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	1 (satu) Dokumen	42,645,000	99,81
6	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	7 (Tujuh) Kelompok	28,292,100	99,88
7	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Ketahanan Pangan	1 (satu) Dokumen	67,069,000	100.00
8	Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (NBM/PPH)	1 (satu) Dokumen	26,793,000	100.00
9	Pertemuan Regional Dewan Ketahanan Pangan	1 (satu) Paket	0.00	0.00
10	Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)	1 (satu) Paket	0.00	0.00
11	Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	1 (satu) Dokumen	24,999,900	100.00
12	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	1 (satu) Dokumen	0.00	0.00
13	Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG)	1 (satu) Dokumen	47,966,000	0,41
14	Pengawasan Keamanan Pangan dan mutu pangan	1 (satu) Laporan	48,625,000	99,90
15	Pendistribusian Beras Cadangan Pangan	5 Ton	0.00	0.00
16	Kegiatan Penyusunan Peta FSVA	1 (satu) Dokumen	40,694,700	99,88
Jumlah			468,104,200	99,02

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Sasaran.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan tahun lalu dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020.

Indikator Kinerja	TA 2018		TA 2019		TA 2020	
	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Ketersediaan Pangan Utama	388	106,30	427	114,86	404,17	107,72
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan	-	-	62	88,57	65,6	87,47
Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida	-	-	99,97	142,81	57,20	76,22
Cakupan Penanganan daerah Rentan rawan Pangan	-	-	99,35	141,93	59,11	78,80

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, pengukuran indikator kinerja tahun anggaran 2020 realisasinya mencapai target diatas 90 %, hanya saja dalam memenuhi capaian kinerja, beberapa kegiatan masih berada dibawah target hal ini terjadi akibat adanya refocusing anggaran. Sedangkan untuk kegiatan lainnya dalam hal pencapaian kinerja diatas 50 % karena kegiatannya dilakukan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam menangani pandemi COVID 19.

Selanjutnya tidak tercapainya target dalam indikator utama lainnya pada tahun-tahun sebelumnya, disebabkan karena dalam perencanaan alokasi anggaran mungkin belum terdata secara maksimal sehingga berpengaruh dalam penetapan rencana kerja, dimana pada tahun 2018 dan 2020 beberapa indikator utama yang diusulkan oleh Dinas Ketahanan Pangan tidak dianggarkan dalam perumusan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Untuk permasalahan diatas solusi atau saran yang dapat disampaikan adalah merencanakan formulasi pengukuran yang mana lebih diutamakan pada program-program pendukung kemandirian pangan dalam hal ini menentukan indikator sasaran yang measurable/dapat diukur dalam pencapaian kinerja yang selurus dengan visi dan misi Pemerintah Daerah serta disesuaikan dengan dukungan anggaran yang memadai demi mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

3. Perbandingan Realisasi Sasaran 2020 dengan Target Rentsra SKPD.

Pencapaian target jangka menengah merupakan bentuk kemajuan pencapaian target kinerja tiap-tiap indikator kinerja dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat. Capaian kinerja jangka menengah merupakan tahapan membandingkan antara realisasi tahun 2020 dengan target lima tahunan, untuk Dinas Ketahanan Pangan capaian kinerja diukur berdasarkan alokasi anggaran yang diperuntukan dalam merealisasikan program-program dalam Renstra 2017-2022. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Evaluasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Renstra SKPD

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2022
Ketersediaan Pangan Utama	94,87%	77,6%	111,73%	105,76%	90%
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan	0	0	68,88%	72,88%	90%
Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida	0	0	9,32%	7,38	90%
cakupan penanganan daerah rentan rawan pangan	10,44	0	53,62%	11,55%	90%

Berdasarkan Tabel 3.4 tampak bahwa target Jangka Menengah Renstra sampai dengan tahun 2020 untuk indikator utama yakni ketersediaan pangan utama sudah melewati target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2017-2022, beberapa Indikator pendukung belum mencapai target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan. Hal ini dikarenakan dalam pengusulan kegiatan untuk pencapaian indikator selalu terkendala dengan kucuran anggaran, dimana pada tahun 2020 hanya satu kegiatan yang mendapat respon dari realisasi APBD Kabupaten Seram Bagian Barat yakni kegiatan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 48.675.000 dari besaran Anggaran dalam Renstra Rp 495.000.000. Sebagian lagi sedikit mendekati target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dan diharapkan sebelum akhir waktu pelaksanaan renstra kekurangan tersebut telah dapat dicapai, Mengingat kegiatan ini untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di masyarakat dilakukan pemantauan sehingga

dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan di semua rantai distribusi pangan baik di tingkat petani, pengepul dan pedagang. Banyaknya cemaran terutama yang disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan dan yang dilarang untuk digunakan dalam pangan dapat menyebabkan keracunan dan menyebabkan sakit pada konsumen, olehnya itu partisipasi anggaran yang memadai dalam rangka pencapaian perwujudan kemandirian dan kedaulatan ketahanan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana yang diamanatkan dalam point kelima Misi Pemerintah Daerah sangat diharapkan.

4. Perbandingan Realisasi Sasaran Tahun 2020 dengan Target Nasional.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 jika dibandingkan dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)	TARGET NASIONAL
Ketersediaan Pangan Utama	0,03	1.601.413 Ton
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan	65,6	95 PPH
Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida	0,18	35 PPM/PPB
cakupan penanganan daerah rentan rawan pangan	-	Berdasarkan Kejadian

Berdasarkan Tabel 3.5 tampak bahwa persentase Realisasi Indikator utama dalam pencapaian ketersediaan pangan utama sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan Nasional yang diukur berdasarkan persentase Peningkatan Luas tanam dan Luas Panen skala nasional, sementara untuk pengukuran skor pola pangan harapan didasarkan pada peningkatan Kesejahteraan Petani yang mana dengan jumlah PPH 65, 6 masih sangat kecil perbandingannya terhadap target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ketahanan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pencapaian target nasional masih sangat jauh dari harapan disebabkan keterbatasan jumlah anggaran akibat dari rasionalisasi anggaran yang disediakan dalam pengalokasian program Ketahanan Pangan Nasional.

Sasaran strategi ini dapat mencapai hasil yang signifikan peningkatannya dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Pendampingan secara berkesinambungan terhadap desa sasaran SOLID;
- Pengembangan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman melalui kegiatan sosialisasi program “One Day No Rice”.
- Pemantauan harga pangan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang dilakukan di 6 (enam) Kecamatan sebagai sentra pasar masyarakat.
- Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang dilaksanakan di desa rawan pangan dan jauh dari akses pasar.
- Penanganan keamanan pangan segar melalui kegiatan penanganan residu pestisida.
- Program aksi pada kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar, diarahkan pada Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang meliputi : (1) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Promosi; (2) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal; serta (3) Promosi dan Sosialisasi P2KP.
- Penyusunan FSVA. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai informasi yang relevan bagi pimpinan dalam menetapkan kebijakan ketersediaan pangan, penanganan rawan pangan dan akses pangan secara tepat dan cepat.

5. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang.

Selain Indikator Kerja Utama (IKU) yang dilakukan untuk pencapaian target sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam upaya pencapaian Nilai AKIP dilakukan secara sinergi antara sub unit kerja dan dikoordinasikan oleh Sekretariat melalui pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diuraikan kedalam 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, kegiatan ini memfasilitasi penyediaan dokumen dan perlengkapan perencanaan serta pelaporan realisasi anggaran Dinas termasuk didalamnya penyusunan dokumen dan peningkatan sumber daya aparatur.
- b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dokumen laporan keuangan tahunan.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja Sasaran diuraikan pada tabel 3.6, sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi program pendukung capaian target sasaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1	Program pelayanan Administrasi Perkantoran			
	– Belanja Pegawai	56,620,000	56,620,000	100.00
	– Belanja Barang dan Jasa	332,030,600	328,425,800	98.91
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	25,670,000	25,670,000	100.00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000	5,000,000	100.00
Jumlah		419,320,600	415,715,800	99,14

Untuk mewujudkan target pada sasaran meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Ketahanan Pangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 577.514.700,- dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 576.577.600,- sehingga Dinas Ketahanan Pangan telah berhasil melakukan efisiensi sebesar Rp. 937.100,- Penyerapan dana dari program-program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran sudah terserap secara maksimal dengan realisasi anggaran yang terserap sebesar 99, 84%.

Selain dilihat dari ketersediaan anggaran Dinas Ketahanan Pangan masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM) maupun Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yakni dengan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, telah disediakan anggaran sebesar Rp. 2.625.881.715,91,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.733.201.915,91,- dan Belanja Langsung Rp. 892.679.800,-. Rincian perbandingan antara anggaran dan realisasi menurut jenis belanja adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi program pendukung Capaian Target sasaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Belanja Tidak Langsung	1.733.201.915.91	1.683.129.974.00	97.11
2	Belanja Langsung	892.679.800.00	883.720.000.00	99,00
	Jumlah	2.625.881.715.91	2.566.849.974.00	97,75

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mencapai target sasaran yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini.

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2020.

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
	1) Pengelolaan Rumah Tangga SKPD	388.550.600	384.945.800	99,07
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	1) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.670.000	21.670.000	100,00
	2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Komputer/ Laptop	4.000.000	4.000.000	100,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Serta Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
	1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja PD	5.000.000	5.000.000	100,00
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
	1) Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	7.200.000	7.200.000	100,00
	2) Kegiatan Pendampingan, Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/SOLID	56.497.500	56.447.500	99,91
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
	1) Analisis dan Penyusun Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (PPH-Konsumsi)	37.107.500	37.107.500	100,00
	2) Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL)	40.264.500	40.264.500	100,00
	3) Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	42.725.000	42.645.000	99,81
	4) Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	28.327.100	28.292.100	99,88
	5) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Ketahanan Pangan	67.069.000	67.069.000	100,00
	6) Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan (NBM/PPH)	26.793.000	26.793.000	100,00
	7) Pertemuan Regional Dewan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00
	8) Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)	0,00	0,00	0,00
	9) Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	24.999.900	24.999.900	100,00
	10) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	0,00	0,00	0,00
11) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG)	53.056.000	47.966.000	90,41	
6	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan			
	1) Pengawasan Keamanan Pangan dan mutu pangan	48.675.000	48.625.000	99,90
7	Program Penanganan Daerah Rawan			
	1) Pendistribusian Beras Cadangan Pangan	0,00	0,00	0,00
	2) Kegiatan Penyusunan Peta FSVA	40.744.700	40.694.700	99,88
Jumlah		892.679.800	883.720.000	99,00

Dari Tabel Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tersebut di atas, terdapat sisa lebih penggunaan anggaran pada beberapa Program dan Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a) Pengelolaan Rumah Tangga SKPD; sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 3.604.800- yang merupakan efisiensi dari belanja barang dan jasa.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; tidak ada sisa lebih dalam realisasi anggaran.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala Komputer/ Laptop; tidak ada sisa lebih dalam realisasi anggaran.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD.
 - a) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD; tidak ada sisa lebih dalam realisasi anggaran.
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a) Kegiatan ini LCM mengalami Refocusing anggaran akibat dari pandemi COVID 19, anggaran yang terealisasi hanya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Provinsi Maluku sebelum mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2020 (COVID 19).
 - b) Kegiatan Pendampingan, Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/SOLID; sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 50.000,- merupakan efisiensi dari belanja pegawai (honor) dan belanja barang dan jasa.
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - a) Kegiatan Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan (PPH-Konsumsi); Tidak ada sisa lebih dalam realisasi anggaran.
 - b) Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL); Tidak ada sisa lebih dalam realisasi anggaran.
 - c) Pemantauan dan analisis harga pangan pokok; sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 80.000,- merupakan efisiensi dari belanja barang dan jasa.

- d) Pengembangan Lumbung Pangan; sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 35.000,- merupakan efisiensi dari belanja barang dan jasa.
 - e) Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan; tidak ada sisa lebih dalam realisasi anggaran.
 - f) Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM); tidak ada sisa lebih dalam realisasi anggaran.
 - g) Pertemuan Dewan Regional Ketahanan Pangan; tidak dialokasikan akibat dari kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid 19.
 - h) Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS); tidak dialokasikan akibat dari kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid 19.
 - i) Penyusunan profil ketahanan Pangan; tidak ada sisa lebih dalam realisasi anggaran.
 - j) Penyusunan rancangan PERDA tentang Kawasan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan; tidak dialokasikan akibat dari kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid 19.
 - k) Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 5.060.000,- yang berasal dari efisiensi dari belanja barang dan jasa.
6. Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan Pangan.
- a) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan; sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 50.000,- yang berasal dari efisiensi dari belanja barang dan jasa.
7. Program penanganan daerah rawan pangan.
- a) Penyaluran Cadangan Pangan; tidak dialokasikan karena mengalami refocusing anggaran.
 - b) Penyusunan Peta PSVA; sisa lebih penggunaan anggaran sebesar Rp 50.000,- yang merupakan efisiensi dari belanja barang dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

A. Masalah Umum yang Dihadapi

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai SKPD teknis yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan ketahanan pangan terkait erat dengan perilaku masyarakat, secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan kedaulatan pangan pada tahun 2020 adalah :

- 1) pendapatan masyarakat masih rendah dibandingkan harga kebutuhan pangan secara umum, sehingga menurunnya daya beli masyarakat disebabkan oleh kenaikan harga pangan daripada masalah ketersediaan;
- 2) Teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah;
- 3) Kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan masih kurang;
- 4) beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjangkau dengan harga yang murah;
- 5) Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat;
- 6) Terdapatnya konsep makan "belum makan kalau belum makan nasi" yang salah dalam masyarakat;
- 7) Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi, jagung, dan sagu masih rendah; dan
- 8) Bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

Secara teknis program dan kegiatan ketahanan pangan, hambatan dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Revisi DPA dan POK baik di pusat maupun daerah akibat dari adanya penyebaran Corona Virus Disease 2020 (COVI 19);

2. Mutasi dan serah terima jabatan tidak disertai dengan serah terima berkas/dokumen pelaksanaan kegiatan;
3. Keterlambatan proses administrasi di kab/kota yang masuk dana Dekonsentrasi/ Bantuan Pemerintah;
4. Satuan harga yang diterapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil;
5. Terbatasnya Infrastruktur dan kondisi alam,
6. Kurang optimalnya partisipasi aparat desa dalam pembinaan dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang diperlukan kelompok unit usaha kecil untuk pengembangan tepung-tepungan sebagai bahan baku olahan pangan lokal di lokasi penerima manfaat.

B. Saran serta cara peningkatan kinerja pada periode mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat di masa mendatang antara lain :

7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran;
8. Meningkatkan informasi peran Dinas Ketahanan Pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan melalui penyebaran informasi ketahanan pangan di media cetak, elektronik dan media publikasi lainnya di daerah;
9. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan baik antar OPD maupun stakeholders lainnya melalui perumusan kebijakan ketahanan pangan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung;
10. Membangun kesadaran kelompok sasaran untuk mendukung pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
11. Mendukung mewujudkan stabilitasi harga komoditas pangan di wilayah gapoktan dan masyarakat melalui Penguatan LDPM, Lumbung Pangan Masyarakat, dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Toko Tani Indonesia;
12. Membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan tingkat rumah tangga/kelompok masyarakat;
13. Mendukung dalam menurunkan KK miskin di Desa/Kawasan Mandiri Pangan.

C. Kesimpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022, baik Pencapaian Kinerja Sasaran, telah terlaksana sangat baik dan lancar walau masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan di lapangan. Capaian kinerja berjalan cukup baik dengan tercapainya beberapa target indikator yang menjadi alat ukur pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020. Program dan kegiatan sebagai alat untuk mencapai kinerja yang diharapkan telah berjalan dengan sangat efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 dengan beberapa catatan isu terkait dengan alokasi anggaran yang belum maksimal sebagai upaya kemandirian dan kedaulatan pangan, serta anomali cuaca yang memiliki tekanan cukup besar terhadap produksi dan produktivitas beberapa produk pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh komitmen, koordinasi, kerjasama, kerja keras dan kemampuan Pimpinan dalam mengatur dan mengarahkan bawahannya untuk secara bersama-sama bergerak mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Permasalahan, kendala dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, diupayakan untuk diperbaiki secara terus menerus agar Visi Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu "Mewujudkan Masyarakat Seram Bagian Barat yang Sejahtera, Berbudhi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal", dapat tercapai.

Tentunya sangat diperlukan adanya komitmen dari Pimpinan eksekutif dan Legislatif untuk memberi perhatian lebih, memahami dan apresiatif terhadap Sektor pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat, diharapkan agar sektor ini tetap lestari sepanjang masa, karena sangat terkait erat dengan sosial cultural masyarakat Maluku umumnya dan masyarakat Seram Bagian Barat khususnya yang agraris.

L
A
M
P
I
R
A
N



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sammy Loupatty, SE

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. M. Yasin Payapo, MPd

Jabatan : Bupati Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,

Drs. M. Yasin Payapo, MPd

Pihak Pertama,

Sammy Loupatty, SE

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam pelayanan publik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	70
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	85
3	Terwujudnya pelaporan keuangan dan Evaluasi kinerja OPD	Meningkatnya sistem pelaporan dan Kinerja OPD	100
4	Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani dan tersedianya sumber pangan yang stabil	75
5	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	peningkatan luas tanam dan luas panen	75
6	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Capaian penganeekaragaman konsumsi pangan	75
7	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat yang rawan pangan	Cakupan menurunnya daerah rawan pangan	50

No	Program	Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 388.550.800	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 25.670.000	APBD
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 5.000.000	APBD
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 63.697500.500	APBD
5	Program Peningkatan Ketahanan pangan	Rp. 320.342.000	APBD
6	Program Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	Rp. 48.675.000	APBD

7 Program Penangan Daerah Rawan Pangan Rp. 40.744.700 APBD

Total Anggaran Rp. 892.679.800 APBD

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,

Drs. M. Yasin Payapo, MPd

Pihak Pertama,

Sammy Loupatty, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ir. Trihard Von Bulow
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,


Ir. Trihard Von Bulow

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam pelayanan publik.	Capaian pelayanan administrasi perkantoran.	1 Paket
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar daerah.	1 Orang
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	20 Orang
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Meningkatnya daya operasional mobil jabatan.	1 Unit
		Meningkatnya operasional kantor	5 Unit
3	Terwujudnya pelaporan keuangan dan Evaluasi kinerja OPD.	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Dinas.	1 Dok
4	Meningkatnya kesejahteraan petani	Pendampingan, pemantauan dan evaluasi desa sasaran SOLID.	22 Desa
5	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani.	Terlaksanya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan.	1 Paket
		Terlaksananya Pertemuan DKP secara berkala.	1 Paket
		Terlaksananya Penyusunan Profil Ketahanan pangan	1 Dok
		Terlaksananya Penyusunan rancangan PERDA Katchewanan Pangan.	1 Perda

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,015,000.00	APBD
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,000,000.00	APBD
3	Penyediaan alat tulis kantor	15,215,600.00	APBD
4	Penyedia jasa administrasi keuangan	56,620,000.00	APBD
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	APBD
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.	18,900,000.00	APBD
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	91,800,000.00	APBD
8	Penyediaan jasa Adiminstrasi teknik dan sopir	198,000,000.00	APBD
9	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.	21,670,000.00	APBD
11	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	5,000,000.00	APBD
12	Pendampingan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani kecil (PKPK) SOLID.	56,497,500.00	APBD
13	Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan.	67,069,000.00	APBD
14	Pertemuan regional Dewan Ketahanan Pangan.	0.00	APBD
15	Penyusunan profil ketahanan pangan.	0.00	APBD
16	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Kawasan pangan dan pertanian berkelanjutan.	0.00	APBD
Jumlah		538,787,100.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,


Ir. Trihard Von Bulow



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Gazali Hehanussa, SP., MSi
Jabatan : Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Seram Bagian Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Ahmad Gazali Hehanussa, SP., MSi

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam pelayanan publik.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antar daerah.	1 Orang
		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	20 Orang
2	Terwujudnya pelaporan keuangan dan Evaluasi kinerja OPD.	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Dinas.	1 Dok
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan.	1 Paket
		Terlaksananya Pertemuan DKP secara berkala.	1 Paket

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.	18,900,000.00	APBD
2	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	91,800,000.00	APBD
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	5,000,000.00	APBD
4	Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan ketahanan pangan.	67,069,000.00	APBD
5	Pertemuan regional Dewan Ketahanan Pangan.	0.00	APBD
Jumlah		182,769,000.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Ahmad. G Hehanussa, SP., MSi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : K. F. Patma Watty, SSI
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,


Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

K. F. Patma Watty, SSI

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam pelayanan publik.	Capaian pelayanan administrasi perkantoran.	1 Paket
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Meningkatnya daya operasional mobil jabatan.	1 Unit
		Meningkatnya operasional kantor	5 Unit
3	Meningkatnya kesejahteraan petani	Pendampingan, pemantauan dan evaluasi desa sasaran SOLID.	22 Desa
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani.	Terlaksananya Penyusunan Profil Ketahanan pangan	1 Dok
		Terlaksananya Penyusunan rancangan PERDA Katahanan Pangan.	1 Perda

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,015,000.00	APBD
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4,000,000.00	APBD
3	Penyediaan alat tulis kantor	15,215,600.00	APBD
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0.00	APBD
5	Penyediaan jasa Adiminstrasi teknik dan sopir	198,000,000.00	APBD
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.	21,670,000.00	APBD
7	Pendampingan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani kecil (PKPK) SOLID.	56,497,500.00	APBD
8	Penyusunan profil ketahanan pangan.	0.00	APBD
9	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Kawasan pangan dan pertanian berkelanjutan.	0.00	APBD
Jumlah		299,398,100.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

K. F. Patma Watty, SSi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Djuharia Hamsidi, SP., MSi
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,



Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Djuharia Hamsidi, SP., MSi

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	Terlaksanannya penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM/PPH) Kabupaten	5 Dok
		Tersedianya Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten	1 Dok
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat yang rawan pangan	Terlaksanannya penyusunan peta FSVA kabupaten Seram Bagian Barat	5 Dok

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Analisis Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan Pangan (NBM/PPH)	26,793,000.00	APBD
2	Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	53,056,000.00	APBD
3	Penyusunan Peta Kerentanan Pangan (FSVA)	40,744,700.00	APBD
Jumlah		120,593,700.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Djuharja Hamsidi, SP., MSi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siti Munira Sahupala, SP
Jabatan : Kepala Seksi Ketersediaan Pangan dan Sumber daya Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Siti Munira Sahupala, SP

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	Terlaksanannya penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM/PPH) Kabupaten	5 Dok
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat yang rawan pangan	Terlaksanannya penyusunan peta FSVA kabupaten Seram Bagian Barat	5 Dok

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Analisis Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan Pangan (NBM/PPH)	26,793,000.00	APBD
2	Penyusunan Peta Kerentanan Pangan (FSVA)	40,744,700.00	APBD
Jumlah		67,537,700.00	APBD

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Siti Munira Sahupala, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Treisye Agustina Kaya, SP
Jabatan : Kepala Seksi Kerawanan Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Treisye Agustina Kaya, SP

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	Tersedianya Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten	1 Dok

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	53,056,000.00	APBD
Jumlah		53,056,000.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Treisye Agustina Kaya, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Meijke Pesulima, SP
Jabatan : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,


Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Meijke Pesulima, SP

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan pokok.	1 Paket
		Berkembangnya cadangan pangan daerah	7 Klpk
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat yang rawan pangan	Terlaksananya penyediaan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah.	50 Ton

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	42,725,000.00	APBD
2	Pengembangan Lumbung Pangan	28,327,100.00	APBD
3	Pendistribusian beras cadangan pangan	0.00	APBD
Jumlah		71,052,100.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Meijke Pesulima, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yongki Danny Soriale, SP
Jabatan : Kepala Seksi Cadangan Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Yongki Danny Soriale, SP

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	Berkembangnya cadangan pangan daerah	7 Klpk

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengembangan Lumbung Pangan	28,327,100.00	APBD
	Jumlah	28,327,100.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Yongki Danny Soriale, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yany Hans Louhatapessy, SP
Jabatan : Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,


Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Yany Hans Louhatapessy, SP

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	Terlaksananya pemantauan dan analisis harga pangan pokok.	1 Paket
2	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat yang rawan pangan	Terlaksananya penyediaan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah.	50 Ton

(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	42,725,000.00	APBD
3	Pendistribusian beras cadangan pangan	0.00	APBD
Jumlah		42,725,000.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Yany Hans Louhatapessy, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hesty Yoice Leatemia, S. Sos
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Hesty Yoice Leatemia, S. Sos

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

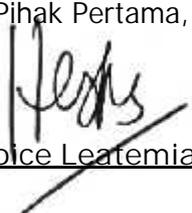
No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Terlaksanan lomba cipta menu tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi	1 (satu) Paket
2	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan	1 (satu) Paket
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	Terlaksananya penyusunan laporan analisisi Konsumsi san suplai pangan (PPH Konsumsi)	1 Dok
		Berkembangnya sistem informasi harga	1 (satu) Paket
		Tersedianya data ketahanan pangan daerah	8 Klpk

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman.	7,200,000.00	APBD
2	Pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan	48,675,000.00	APBD
3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan suplai pangan (PPH-Konsumsi)	37,107,500.00	APBD
4	Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia	0.00	APBD
5	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL)	40,264,500.00	APBD
Jumlah		133,247,000.00	APBD

Piru, Februari 2020

Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Hesty Yoice Leatemia, S. Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fauzia Derlauw, SP
Jabatan : Kepala Seksi Keamanan Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

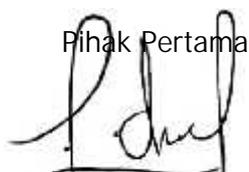
PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Fauzia Derlauw, SP

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan	1 (satu) Paket

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan	48,675,000.00	APBD
	Jumlah	48,675,000.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Fauzia Derlauw, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Febri Yanti Tuasikal, SP
Jabatan : Kepala Seksi Konsumsi Pangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sammy Loupatty, SE
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Febri Yanti Tuasikal, SP

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Terlaksanan lomba cipta menu tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi	1 (satu) Paket
2	Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan	Terlaksananya pengawasan mutu dan keamanan pangan	1 (satu) Paket
3	Meningkatnya Ketahanan Pangan di Masyarakat petani	Terlaksananya penyusunan laporan analisisi Konsusmsi san suplai pangan (PPH Konsumsi)	1 Dok
		Berkembangnya sistem informasi harga	1 (satu) Paket
		Tersedianya data ketahanan pangan daerah	8 Klpk

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Lomba cipta menu beragam, bergizi seimbang dan aman.	7,200,000.00	APBD
2	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan suplai pangan (PPH-Konsumsi)	37,107,500.00	APBD
3	Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia	0.00	APBD
4	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan (KRPL)	40,264,500.00	APBD
Jumlah		84,572,000.00	APBD

Piru, Februari 2020



Pihak Kedua,

Sammy Loupatty, SE

Pihak Pertama,

Febri Yanti Tuasikal, SP

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH	REALISASI ANGGARAN SEMESTER I dan II			JUMLAH	PERSENTASE (%)		SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
		PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL		KEUANGAN	FISIK	
1	2	3			4	5			6	7	8	9
2.3.01	BELANJA LANGSUNG											
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56,520,000.00	332,030,600.00	0.00	388,550,600.00	56,520,000.00	328,425,800.00	0.00	384,945,800.00	99.07	100.00	(3,604,800.00)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00	4,015,000.00	0.00	4,015,000.00	0.00	4,015,000.00	0.00	4,015,000.00	100.00	100.00	0.00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00	100.00	0.00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56,520,000.00	100,000.00	0.00	56,620,000.00	56,520,000.00	100,000.00	0.00	56,620,000.00	100.00	100.00	0.00
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00	15,215,600.00	0.00	15,215,600.00	0.00	15,215,600.00	0.00	15,215,600.00	100.00	100.00	0.00
5	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
6	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	0.00	18,900,000.00	0.00	18,900,000.00	0.00	15,295,200.00	0.00	15,295,200.00	80.93	0.00	- 3,604,800.00
7	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0.00	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	0.00	91,800,000.00	100.00	100.00	0.00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Sopir	0.00	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00	0.00	198,000,000.00	100.00	100.00	0.00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0.00	25,670,000.00	0.00	25,670,000.00	0.00	25,670,000.00	0.00	25,670,000.00	100.00	100.00	0.00
9	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0.00	21,670,000.00	0.00	21,670,000.00	0.00	21,670,000.00	0.00	21,670,000.00	100.00	100.00	0.00
10	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Komputer/ Laptop	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00	0.00	0.00
III	Program Peningkatan Pengembangan Serta Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,600,000.00	400,000.00	0.00	5,000,000.00	4,600,000.00	400,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00	100.00	0.00
1.	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja PD	4,600,000.00	400,000.00	0.00	5,000,000.00	4,600,000.00	400,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00	100.00	0.00

IV	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2,110,000.00	61,587,500.00	0.00	63,697,500.00	2,110,000.00	61,537,500.00	0.00	63,647,500.00	103.79	200.00	(50,000.00)
1	Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	100.00	0.00
2.	Kegiatan Pendampingan, Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/SOLID	2,110,000.00	54,387,500.00	0.00	56,497,500.00	2,110,000.00	54,337,500.00	0.00	56,447,500.00	103.79	100.00	- 50,000.00
V	Program Peningkatan Ketahanan Petani	58,465,000.00	261,877,000.00	0.00	320,342,000.00	58,465,000.00	256,672,000.00	0.00	315,137,000.00	790.10	300.00	(5,205,000.00)
1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (PPH-Konsumsi)	3,530,000.00	33,577,500.00	0.00	37,107,500.00	3,530,000.00	33,577,500.00	0.00	37,107,500.00	100.00	0.00	0.00
2	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL)	2,740,000.00	37,524,500.00	0.00	40,264,500.00	2,740,000.00	37,524,500.00	0.00	40,264,500.00	100.00	0.00	0.00
3	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	5,830,000.00	36,895,000.00	0.00	42,725,000.00	5,830,000.00	36,815,000.00	0.00	42,645,000.00	99.81	100.00	- 80,000.00
4	Pengembangan Lumbung Pangan	5,830,000.00	22,497,100.00	0.00	28,327,100.00	5,830,000.00	22,462,100.00	0.00	28,292,100.00	99.88	100.00	- 35,000.00
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Ketahanan Pangan	2,110,000.00	64,959,000.00	0.00	67,069,000.00	2,110,000.00	64,959,000.00	0.00	67,069,000.00	100.00	0.00	0.00
6	Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	5,230,000.00	21,563,000.00	0.00	26,793,000.00	5,230,000.00	21,563,000.00	0.00	26,793,000.00	100.00	0.00	0.00
7	Pertemuan Regional Dewan Ketahanan Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
8	Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00
9	Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	22,650,000.00	2,349,900.00	0.00	24,999,900.00	22,650,000.00	23,499,000.00	0.00	24,999,900.00	100.00	100.00	0.00
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG)	10,545,000.00	42,511,000.00	0.00	53,056,000.00	10,545,000.00	37,421,000.00	0.00	47,966,000.00	90.41	0.00	- 5,090,000.00
VI	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	4,850,000.00	43,825,000.00	0.00	48,675,000.00	4,850,000.00	43,775,000.00	0.00	48,625,000.00	0.00	0.00	(50,000.00)
1	Pengawasan Keamanan Pangan dan mutu pangan	4,850,000.00	43,825,000.00	0.00	48,675,000.00	4,850,000.00	43,775,000.00	0.00	48,625,000.00	0.00	0.00	- 50,000.00

VII	Program Penanganan Daerah Rawan Pangan	945,000.00	39,799,700.00	0.00	40,744,700.00	945,000.00	39,749,700.00	0.00	40,694,700.00	99.88	0.00	(50,000.00)
1	Kegiatan Pendistribusi Beras Cadangan Pangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Kegiatan Penyusunan Peta FSVA	945,000.00	39,799,700.00	0.00	40,744,700.00	945,000.00	39,749,700.00	0.00	40,694,700.00	99.88	0.00	50,000.00
TOTAL		127,490,000.00	765,189,800.00	0.00	892,679,800.00	127,490,000.00	756,230,000.00	0.00	883,720,000.00	99.00	114.29	(8,959,800.00)

Struktur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat

